

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Undang-undang No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah adalah satu kesatuan dalam sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengan tujuan untuk menjamin adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi.

Rencana Kinerja Tahunan Organisasi Perangkat Daerah merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah yang mencakup periode tahunan. Rencana Kinerja Tahunan Organisasi Perangkat Daerah menggambarkan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah (OPD) dan indikator kinerja beserta target-targetnya berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategik. Target kinerja tahunan di dalam rencana kinerja ditetapkan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Target kinerja tersebut merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam satu periode tahunan.

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi merupakan bagian dari Organisasi Pemerintahan Daerah yang mempunyai peran sebagai pembina dan pengembang Sumber Daya Aparatur Pemerintah Daerah Provinsi Jambi. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Untuk menjamin tercapainya pelaksanaan tugas dan kegiatan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jambi sesuai dengan yang telah dirumuskan pada Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) BKD Provinsi Jambi Tahun 2019, maka

disusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT). RKT merupakan dokumen yang berisi informasi tentang tingkat atau target kinerja berupa output dan atau outcome yang ingin diwujudkan oleh suatu organisasi pada satu tahun tertentu. RKT menuntut konsistensi antar pelaksanaan kegiatan dengan proses dan ketentuan dalam Renja dan Renstra sehingga diperlukan kompetensi, profesionalisme, dan disiplin pegawai dilingkungan BKD Provinsi Jambi dalam melaksanakan kegiatannya.

Rencana Kinerja Tahunan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi Tahun 2019 memuat pelaksanaan program dan kegiatan yang dapat dipertanggungjawabkan. RKT ini juga dapat dijadikan sebagai data guna peningkatan kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi di masa yang akan datang.

## **B. Gambaran Umum**

### **B.1. Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Provinsi Jambi**

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi dan Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah pada bidang kepegawaian daerah.

Adapun Susunan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi dan Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi adalah sebagai berikut:

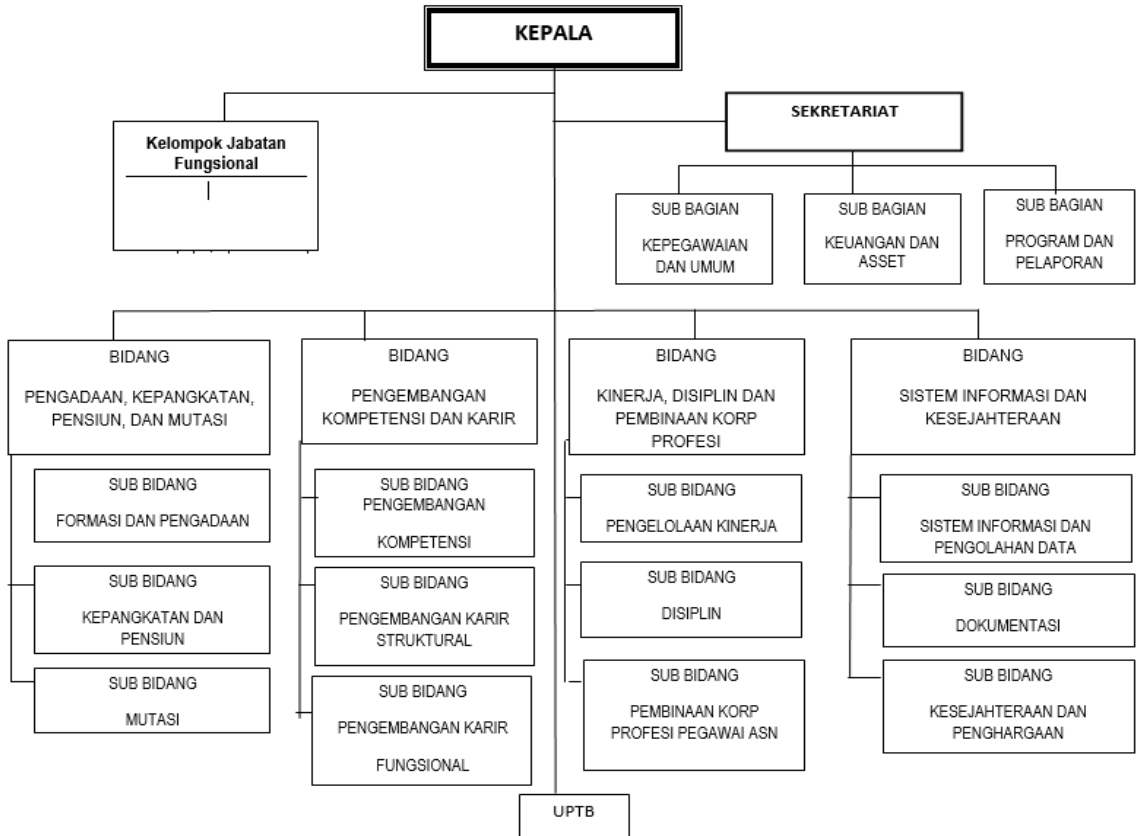
- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
  - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - 2. Sub Bagian Keuangan dan Asset; dan
  - 3. Sub Bagian Program dan Pelaporan
- c. Bidang Pengadaan Kepangkatan Pensiun dan Mutasi, terdiri dari:
  - 1. Sub Bidang Formasi dan Pengadaan;
  - 2. Sub Bidang Kepangkatan dan Pensiun; dan
  - 3. Sub Bidang Mutasi
- d. Bidang Pengembangan Kompetensi dan Karir, terdiri dari:
  - 1. Sub Bidang Pengembangan Kompetensi;
  - 2. Sub Bidang Pengembangan Karir Struktural; dan
  - 3. Sub Bidang Pengembangan Karir Fungsional
- e. Bidang Kinerja, Disiplin dan Pembinaan Korps Profesi, terdiri dari:
  - 1. Sub Bidang Pengelolaan Kinerja;
  - 2. Sub Bidang Disiplin; dan
  - 3. Sub Bidang Pembinaan Korps Profesi Pegawai ASN
- f. Bidang Sistem Informasi dan Kesejahteraan, terdiri dari:
  - 1. Sub Bidang Sistem Informasi dan Pengelolaan Data;
  - 2. Sub Bidang Dokumentasi; dan
  - 3. Sub Bidang Kesejahteraan dan Penghargaan
- g. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB); dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang, Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan Sub Bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang.

Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Jambi Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi adalah sebagai berikut:

## Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi

**Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Jambi**  
**Nomor : 58 Tahun 2016**  
**Tanggal : 29 Desember 2016**



## **B.2. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi**

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi Jambi Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

1. Tugas :

Membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

2. Fungsi :

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, BKD Provinsi Jambi mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian;
- b. Penyelenggaraan kebijakan teknis dalam penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, promosi, mutasi, penilaian kinerja, tunjangan kinerja, penghargaan, disiplin, pemberhentian, dan perlindungan pegawai ASN sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Penyelenggaraan pelayanan administrasi kepegawaian bagi pegawai ASN sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Penyelenggaraan, koordinasi dan fasilitasi penyusunan dan penetapan kebutuhan pegawai ASN;
- e. Penyelenggaraan, koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengadaan pegawai ASN;
- f. Penyelenggaraan, koordinasi dan fasilitasi pengangkatan dan pengambilan sumpah atau janji calon PNS;
- g. Penyelenggaraan, koordinasi dan fasilitasi pengisian, pelantikan, pengambilan sumpah atau janji, serta pemberhentian PNS dari jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, dan jabatan pengawas;

- h. Penyelenggaraan, koordinasi dan fasilitasi pengisian, pengangkatan, dan pemberhentian PNS dari jabatan fungsional;
- i. Penyelenggaraan, koordinasi dan fasilitasi penyusunan dan penetapan evaluasi jabatan lingkup pemerintah Provinsi Jambi;
- j. Penyelenggaraan, koordinasi dan fasilitasi perumusan standar kompetensi jabatan, penyelenggaraan pemetaan potensi, dan penilaian kompetensi PNS dalam rangka manajemen pengembangan karir;
- k. Penyelenggaraan, koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan mutasi pegawai ASN;
- l. Penyelenggaraan, koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengelolaan kinerja pegawai ASN;
- m. Penyelenggaraan, verifikasi dan fasilitasi pemberian tunjangan kinerja/tunjangan penghasilan PNS;
- n. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi penyusunan dan penetapan evaluasi jabatan lingkup pemerintah provinsi;
- o. Penyelenggaraan, koordinasi dan fasilitasi pemberian penghargaan kepada pegawai ASN yang berprestasi dan penghargaan manajemen kepegawaian kepada satuan kerja perangkat daerah (Gubernur Awards);
- p. Penyelenggaraan, koordinasi dan fasilitasi penegakan peraturan disiplin pegawai ASN;
- q. Penyelenggaraan, koordinasi dan fasilitasi pembinaan jiwa kopr profesi pegawai ASN;
- r. Penyelenggaraan, koordinasi dan fasilitasi pensiun PNS dan pemberhentian pegawai ASN;
- s. Penyelenggaraan, koordinasi dan fasilitasi pengembangan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian;
- t. Penyelenggaraan, koordinasi dan fasilitasi penelitian, pengembangan, dan kerjasama dengan pihak lain di bidang manajemen kepegawaian;

- u. Penyelenggaraan, koordinasi dan fasilitasi pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan manajemen kepegawaian;
- v. Penyelenggaraan pertanggungjawaban Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Badan dan Laporan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- w. Pengembangan standar mutu pelayanan kepegawaian;
- x. Penetapan penyusunan laporan tahunan badan;
- y. Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan di bidang manajemen kepegawaian;
- z. Pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan dukungan administrasi kepegawaian kepada seluruh unit kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- aa. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang manajemen kepegawaian; dan
- bb. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **B.3. Keadaan Pegawai**

Sumber Daya Manusia yang disingkat SDM merupakan faktor sentral dan strategis dalam suatu organisasi. SDM dalam sebuah organisasi adalah penggerak organisasi tersebut. Demikian pula dengan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi untuk melaksanakan tugas dan fungsi perlu didukung oleh Sumber Daya Manusia yang memadai, profesional dan handal. Berdasarkan Daftar Urut Kepangkatan Tahun 2018 Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi didukung dengan 117 orang Pegawai Negeri Sipil, dengan perincian sebagai berikut:

a. Keadaan Pegawai Negeri Sipil Menurut Jabatan/Eselon.

**Tabel 1.1.**  
**Keadaan Pegawai Negeri Sipil Menurut Jabatan Tahun 2018**

No.	Jabatan/Eselon	Jumlah	Persentase (%)	Jenis Kelamin	
				Laki-Laki	Perempuan
1.	Pimpinan Tinggi Pratama/ Eselon II	1	0.83	1	0
2.	Administrator/ Eselon III	5	4.13	4	1
3.	Pengawas/ Eselon IV	15	12.40	11	4
4.	Fungsional Arsiparis	1	0.83	0	1
5.	Fungsional Pranata Komputer	7	5.79	6	1
6.	Fungsional Analisis Kepegawaian	1	0.83	0	1
7.	Fungsional Umum	91	75.21	46	45
<b>Jumlah :</b>		<b>121</b>	<b>100</b>	<b>68</b>	<b>53</b>

Sumber Data : Daftar Urut Kepangkatan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi Tahun 2018

b. Keadaan Pegawai Negeri Sipil Menurut Golongan Ruang Gaji.

**Tabel 1.2.**  
**Keadaan PNS BKD Provinsi Jambi Menurut Golongan Ruang Gaji Tahun 2018**

No.	Golongan Ruang Gaji	Jumlah	Persentase (%)	Jenis Kelamin	
				Laki-Laki	Perempuan
1.	Golongan IV	14	11.57	11	3
2.	Golongan III	97	80.17	50	47
3.	Golongan II	10	8.26	7	3
4.	Golongan I	0	0.00	0	0
<b>Jumlah :</b>		<b>121</b>	<b>100</b>	<b>68</b>	<b>53</b>

Sumber Data : Daftar Urut Kepangkatan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi Tahun 2018

Berdasarkan data pada tabel 1.2 diketahui bahwa Pegawai Negeri Sipil di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi didominasi oleh golongan III, yang berjumlah 97 orang atau 80,17% terdiri dari 50 orang Laki-Laki dan 47 Orang Perempuan, sedang golongan ruang gaji terkecil adalah golongan II yang berjumlah 10 orang atau 8,26% terdiri dari 7 orang Laki-Laki dan 3 orang Perempuan.



- c. Keadaan Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Pendidikan Formal.

**Tabel 1.3.**  
**Tingkat Pendidikan Formal PNS BKD Provinsi Jambi**  
**Tahun 2018**

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)	Jenis Kelamin	
				Laki-Laki	Perempuan
1.	Sarjana Strata III (S.3)	0	0.00	0	0
2.	Sarjana Strata II (S.2)	19	15.70	14	5
3.	Sarjana Strata I (S.1)	69	57.02	38	31
4.	Diploma IV (D.IV)	3	2.48	3	0
5.	Diploma III (D.III)	11	9.09	5	6
6.	Diploma II (D.II)	1	0.83	0	1
7.	Diploma I (D.I)	0	0.00	0	0
8.	SLTA	18	14.88	8	10
9.	SLTP	0	1.08	0	0
10.	SD	0	0.00	0	0
<b>Jumlah :</b>		<b>121</b>	<b>100</b>	<b>68</b>	<b>53</b>

Sumber Data : Daftar Urut Kepangkatan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi Tahun 2018

Dari data pada tabel 1.3. diketahui bahwa pendidikan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi, didominasi oleh tingkat pendidikan Sarjana Strata I (S.1) yang berjumlah 69 orang atau 57,02% terdiri dari 38 orang Laki-Laki dan 31 Orang Perempuan. Secara umum tingkat pendidikan Pegawai Negeri Sipil Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi cukup baik, dimana dari 121 Orang Pegawai Negeri Sipil terdapat 19 orang atau 15,70% (14 Orang Laki-Laki dan 5 Orang Perempuan) yang berpendidikan Sarjana Strata II (S.2).

- d. Keadaan Pegawai Negeri Sipil Menurut Jenis Kelamin.

**Tabel 1.4.**  
**Keadaan PNS BKD Provinsi Jambi Menurut Jenis Kelamin**

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
1.	Laki-Laki	69	58,97
2.	Perempuan	48	41,03
<b>Jumlah :</b>		<b>117</b>	<b>100</b>

Sumber Data : Daftar Urut Kepangkatan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi Tahun 2018

Data pada Tabel 1.4. menggambarkan bahwa Pegawai Negeri Sipil Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi didominasi jenis kelamin Laki-Laki yang mencapai 69 Orang atau 58,97% dari total keseluruhan PNS Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi.

### **C. Landasan Hukum**

Dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi Tahun 2019, payung hukum yang dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah

- Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  17. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 6);
  18. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 8).
  19. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi Tahun 2016-2021;

20. Rencana Strategis (Renstra) BKD Provinsi Jambi tahun 2016-2021.

#### **D. Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi tahun 2019 ini dimaksudkan sebagai gambaran umum rencana kerja yang menjadi target pencapaian tahun 2019 sehingga dapat menjadi instansi yang akuntabel dan tepat sasaran dalam rangka mewujudkan aparatur yang handal dan professional yang mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Tujuan dari Kinerja Tahunan Badan Daerah Provinsi Jambi tahun 2019 adalah dapat mewujudkan akuntabilitas Badan Kepegawaian Daerah dan sebagai perwujudan salah satu kewajiban dalam melaksanakan program, kegiatan dan anggaran sehingga menghasilkan manfaat antara lain :

- a. Meningkatkan Akuntabilitas Badan Kepegawaian Daerah provinsi Jambi.
- b. Sebagai umpan balik Peningkatan Kinerja Instansi pemerintah Badan Kepegawaian Daerah provinsi Jambi.
- c. Meningkatkan perencanaan disemua bidang Badan kepegawaian Daerah Provinsi Jambi dimasa yang akan datang.
- d. Meningkatkan Kredibilitas Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi dimata instansi pemerintah lainnya
- e. Menjadikan aparatur yang professional, akuntabel dan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat Provinsi Jambi.

## **BAB II**

### **TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR**

Berdasarkan Visi dan Misi Kepala Daerah Provinsi Jambi yang diturunkan melalui tujuan dan sasaran Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.1.**

#### **Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Tahun 2019**

<b>No.</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR SASARAN</b>	<b>TARGET</b>
1.	Terwujudnya peningkatan kualitas Sumber Daya Aparatur.	1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Sipil Negara.	1. Persentase ASN yang memiliki kompetensi sesuai jabatannya.	5%
		2. Peningkatan Kualitas Penataan Aparatur Sipil Negara	2. Persentase penetapan ASN dalam jabatan.	10%
		3. Meningkatnya Disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara.	3. Persentase peningkatan penanganan pelanggaran disiplin.	60%
		4. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kepegawaian.	4. Indeks kepuasan pelayanan administrasi kepegawaian.	B

## **BAB III**

### **RENCANA KINERJA TAHUNAN**

Dalam rangka menuju pencapaian Visi dan Misi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi, maka pada tahun 2019 Rencana Kinerja Tahunan yang akan dilaksanakan dapat tergambar sebagai berikut:

#### **A. Program dan Kegiatan**

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok, fungsi dan wewenang, pelayanan yang diberikan oleh BKD Provinsi Jambi adalah pelayanan berupa urusan kepegawaian kepada aparatur pemerintah. Pada tahun anggaran 2019 Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi melaksanakan 13 (tiga belas) program dan 48 (empat puluh delapan) kegiatan terdiri dari:

##### **I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
5. Penyediaan Alat Tulis Kantor
6. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
9. Penyediaan Makanan dan Minuman
10. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar dan Dalam Daerah

##### **II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

1. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
2. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
  5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
  6. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
- III. Program Pembinaan Bakat dan Peningkatan Prestasi Anggota KORPRI di Bidang Olah Raga**
1. Pekan Olah Raga KORPRI Tingkat Nasional
- IV. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**
1. Rapat Koordinasi Tahunan KORPRI se-Provinsi Jambi
- V. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**
1. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran, Rencana Kerja, Penetapan Kinerja, RKT, LAKIP, LKPJ dan LPPD BKD, serta Penyusunan dan Revisi RENSTRA SKPD
  2. Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Barang Milik Daerah
- VI. Program Pembinaan Bakat dan Peningkatan Prestasi Anggota KORPRI di Bidang Keagamaan Mental dan Rohani**
1. Pembelajaran Seni Baca Al Qur'an
- VII. Program Penataan, Perencanaan dan Rekrutmen SDM Aparatur berbasis Kompetensi**
1. Penyusunan Rencana Aksi Penataan dan Distribusi PNS
  2. Penyusunan Perencanaan Formasi PNS/PPPK Lima Tahunan dan Tahunan
  3. Seleksi CPNS/PPPK Berbasis Sistem CAT (Computer Assited Test)
  4. Seleksi Calon Praja IPDN Secara Terbuka
  5. Penataan Pegawai Non PNS/PPPK/Tenaga Kontrak
- VIII. Program Promosi dan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka**
1. Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
  2. Seleksi Pejabat Administrasi



**IX. Program Profesionalisasi PNS**

1. Peningkatan Kemampuan ASN Melalui Pemberian Beasiswa Tugas Belajar dan Cost Sharing
2. Peningkatan Kemampuan ASN Melalui Pengembangan Kompetensi, Diklat, Bimtek, Seminar, Kursus, Sosialisasi dan Workshop
3. Penyelenggaraan Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah
4. Pelayanan Administrasi Jabatan Fungsional Tertentu
5. Pemantauan Disiplin PNS dan Non PNS/PPPK
6. Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS
7. Pelaksanaan Sumpah/Janji PNS

**X. Program Peningkatan Kesejahteraan PNS dan Pemberian Penghargaan PNS**

1. Penyediaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya
2. Pemberian Penghargaan dan Kesejahteraan PNS

**XI. Program Pelayanan Publik di Bidang Kepegawaian**

1. Pelayanan Administrasi Pendidikan Lanjutan Aparatur Sipil Negara
2. Pelayanan Pengangkatan CPNS, Kenaikan Pangkat PNS dan Pensiun PNS
3. Pelayanan Mutasi dan Kenaikan Gaji Berkala
4. Pengelolaan, Pelayanan dan Fasilitasi Penerbitan Kartu Pegawai (Karpeg), Kartu Pegawai Elektronik (KPE), Kartu Isteri (Karis) / Kartu Suami (Karsu)
5. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Kepegawaian

**XII. Program Penyusunan Kebijakan, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan**

1. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi/Rapat Kerja/Forum kepala BKD se-Provinsi/FGD di Bidang Kepegawaian
2. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan

### **XIII. Program Peningkatan Kualitas Informasi Kepegawaian**

1. Penyusunan Buku Data Kepegawaian Pemerintah Provinsi Jambi dan SKPD Provinsi Jambi serta Daftar Urutan Kepangkatan PNS
2. Pengelolaan, Pemeliharaan Data dan Informasi Kepegawaian
3. Pengelolaan dan Pemeliharaan Tata Naskah Dinas Kepegawaian Elektronik dan Arsip Fisik
4. Pengembangan Aplikasi Pelayanan Kepegawaian

#### **B. Alokasi Anggaran**

Anggaran merupakan rencana keuangan secara priode yang telah disusun berdasarkan program dan kegiatan yang telah disahkan. Secara garis besar anggaran pengeluaran terbagi 2 (dua) Belanja Tidak langsung dan Belanja langsung. Belanja tidak langsung (BTL) adalah belanja yang tidak langsung berkaitan dengan kegiatan (Gaji Pegawai) dan sedangkan Belanja langsung (BL) belanja yang berhubungan langsung dengan kegiatan yang sifatnya untuk mencapai tujuan organisasi SKPD oleh sebab itu Alokasi Keuangan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi dapat tergambar dalam tabel berikut ini :

**Tabel 3.1. Alokasi Keuangan BKD Provinsi Jambi Tahun 2019**

No.	Uraian	Pagu	Persentase (%)
1.	Belanja Tidak Langsung	Rp. 13.026.358.961,-	68.17 %
2.	Belanja Langsung	Rp. 6.081.000.000,-	31.83 %
	<b>TOTAL</b>	<b>Rp. 19.107.358.961,-</b>	<b>100 %</b>

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, dapat diuraikan pokok-pokok kesimpulan sebagai berikut :

1. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi sebagai satu-satunya lembaga pemerintah yang mempunyai peran terdepan dalam mengemban amanat pemerintah untuk menyelenggarakan manajemen Aparatur Sipil Negara dimana program dan kegiatan disusun untuk mewujudkan aparatur yang profesional, bermoral etika, akuntabel dan sejahtera yang mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
2. Rencana Kinerja Tahunan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi 2019 disusun sesuai dengan Visi dan Misi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi yang tertuang dalam Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi.

#### **B. Saran**

Saran merupakan suatu masukan atau anjuran yang bersifat baik dan membangun oleh sebab itu Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi menyarankan sebagai berikut :

1. Diperlukan Komitmen dan dukungan dari semua pihak Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi masing – masing sehingga dapat menjalankan system pemerintahan yang berorientasi pada hasil, berbasis kinerja dan bertujuan melayani serta memberdayakan aparatur dan masyarakat.
2. Diperlukan koordinasi yang lebih dari berbagai bidang yang ada pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi maupun dengan instansi lain yang terkait dalam melaksanakan program dan kegiatan demi pencapaian target yang lebih optimal.

3. Rencana kinerja ini dapat tercapai bila dilaksanakan dengan penuh dedikasi dan kerja keras oleh sumber daya manusia dan potensi yang ada, dengan harapan mampu memberikan kontribusi positif bagi upaya pemerintah Provinsi Jambi dalam rangka merencanakan pembangunan daerah khususnya di lingkungan BKD Provinsi Jambi. Dimana keberhasilan suatu organisasi tidak hanya diukur dari habisnya anggaran yang telah dialokasikan, tetapi difokuskan pada aspek efisiensi yang dapat dicapai, kualitas output yang dihasilkan serta efektivitas mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.



DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir  
DPA SKPD  
2.2

PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

Tahun Anggaran 2019

Urusan Pemerintahan : 4.05 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kepegawaian  
Organisasi : 4.05.01 Badan Kepegawaian Daerah  
Sub Unit Organisasi : 4.05.01.01 Badan Kepegawaian Daerah

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE PROGRAM & KEGIATAN	URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	Sumber Dana	TRIWULAN				JUMLAH
					I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 6 + 7 + 8 + 9
4.05.4.05.01.01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>				302.935.975,00	303.326.975,00	298.145.975,00	244.452.475,00	1.148.861.400,00
4.05.4.05.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Provinsi Jambi	12 Bulan	7	500.000,00	1.750.000,00	1.050.000,00	0,00	3.300.000,00
4.05.4.05.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Provinsi Jambi	12 Bulan	7	104.175.000,00	104.175.000,00	104.175.000,00	73.575.000,00	386.100.000,00
4.05.4.05.01.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Provinsi Jambi	12 Bulan	7	61.877.000,00	57.187.000,00	53.587.000,00	35.143.500,00	207.794.500,00
4.05.4.05.01.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Provinsi Jambi	12 Bulan	7	23.250.000,00	23.631.000,00	23.250.000,00	23.250.000,00	93.381.000,00
4.05.4.05.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Provinsi Jambi	12 Bulan	7	11.871.475,00	11.871.475,00	11.871.475,00	11.871.475,00	47.485.900,00
4.05.4.05.01.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Provinsi Jambi	12 Bulan	7	5.650.000,00	5.650.000,00	5.650.000,00	5.550.000,00	22.500.000,00
4.05.4.05.01.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Provinsi Jambi	12 Bulan	7	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	10.000.000,00
4.05.4.05.01.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Provinsi Jambi	4080 Eksemplar	7	4.100.000,00	4.050.000,00	4.050.000,00	4.050.000,00	16.250.000,00
4.05.4.05.01.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Provinsi Jambi	12 Bulan	7	4.000.000,00	7.500.000,00	7.000.000,00	3.500.000,00	22.000.000,00
4.05.4.05.01.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar dan Dalam Daerah	Provinsi Jambi dan Luar Provinsi Jambi	92 OK	7	85.012.500,00	85.012.500,00	85.012.500,00	85.012.500,00	340.050.000,00
4.05.4.05.01.02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>				77.250.000,00	385.750.000,00	76.300.000,00	129.750.000,00	669.050.000,00
4.05.4.05.01.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Provinsi Jambi	5 Jenis	7	0,00	17.250.000,00	0,00	51.000.000,00	68.250.000,00
4.05.4.05.01.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Provinsi Jambi	7 Jenis	7	10.000.000,00	140.750.000,00	0,00	4.000.000,00	154.750.000,00
4.05.4.05.01.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Provinsi Jambi	1 Unit	7	16.950.000,00	16.950.000,00	16.950.000,00	16.950.000,00	67.800.000,00
4.05.4.05.01.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Provinsi Jambi	12 Bulan	7	40.300.000,00	43.800.000,00	49.900.000,00	53.800.000,00	187.800.000,00

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH									
KODE PROGRAM & KEGIATAN	URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	Sumber Dana	TRIWULAN				JUMLAH
					I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 6 + 7 + 8 + 9
4.05 . 4.05.01 . 02 . 28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Provinsi Jambi	12 Bulan	7	10.000.000,00	17.000.000,00	9.450.000,00	4.000.000,00	40.450.000,00
4.05 . 4.05.01 . 02 . 42	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Provinsi Jambi	1 Unit	7	0,00	150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 04	<b>Program Pembinaan Bakat dan Peningkatan Prestasi Anggota KORPRI di Bidang Olah Raga</b>				1.947.000,00	58.123.200,00	1.947.000,00	72.482.800,00	134.500.000,00
4.05 . 4.05.01 . 04 . 01	Pekan Olah Raga KORPRI Tingkat Nasional	Provinsi Jambi dan Luar Provinsi Jambi	15 Besar	7	1.947.000,00	58.123.200,00	1.947.000,00	72.482.800,00	134.500.000,00
4.05 . 4.05.01 . 05	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>				39.467.850,00	0,00	0,00	0,00	39.467.850,00
4.05 . 4.05.01 . 05 . 05	Rapat Koordinasi Tahunan KORPRI se-Provinsi Jambi	Provinsi Jambi	100 Orang	7	39.467.850,00	0,00	0,00	0,00	39.467.850,00
4.05 . 4.05.01 . 06	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>				18.826.600,00	19.752.322,46	3.600.000,00	1.412.400,00	43.591.322,46
4.05 . 4.05.01 . 06 . 01	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran, Rencana Kerja, Penetapan Kinerja, RKT, LAKIP, LKPI dan LPPD BKD, serta Penyusunan dan Revisi RENSTRA SKPD	Provinsi Jambi	7 Dokumen Laporan	7	14.576.600,00	13.002.322,46	0,00	0,00	27.578.922,46
4.05 . 4.05.01 . 06 . 02	Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Barang Milik Daerah	Provinsi Jambi	12 Bulan	7	4.250.000,00	6.750.000,00	3.600.000,00	1.412.400,00	16.012.400,00
4.05 . 4.05.01 . 09	<b>Program Pembinaan Bakat dan Peningkatan Prestasi Anggota KORPRI di Bidang Keagamaan Mental dan Rohani</b>				0,00	28.500.500,00	0,00	0,00	28.500.500,00
4.05 . 4.05.01 . 09 . 01	Pembelajaran Seni Baca Al Qur'an	Provinsi Jambi	100 Orang	7	0,00	28.500.500,00	0,00	0,00	28.500.500,00
4.05 . 4.05.01 . 10	<b>Program Penataan, Perencanaan dan Rekrutmen SDM Aparatur berbasis Kompetensi</b>				115.715.723,10	99.411.800,00	77.411.464,44	1.947.000,00	294.485.987,54
4.05 . 4.05.01 . 10 . 01	Penyusunan Rencana Aksi Penataan dan Distribusi PNS	Provinsi Jambi	12 Bulan	7	12.408.700,00	22.362.800,00	13.300.000,00	0,00	48.071.500,00
4.05 . 4.05.01 . 10 . 02	Penyusunan Perencanaan Formasi PNS/PPPK Lima Tahunan dan Tahunan	Povinsi Jambi	12 Bulan	7	24.885.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	39.885.000,00
4.05 . 4.05.01 . 10 . 03	Seleksi CPNS/PPPK Berbasis Sistem CAT (Computer Assited Test)	Provinsi Jambi	1 Kali	7	42.121.364,10	27.000.000,00	5.000.000,00	0,00	74.121.364,10
4.05 . 4.05.01 . 10 . 04	Seleksi Calon Praja IPDN Secara Terbuka	Provinsi Jambi & Bandung	7000 Orang	7	32.719.900,00	35.049.000,00	39.161.464,44	1.947.000,00	108.877.364,44
4.05 . 4.05.01 . 10 . 05	Penataan Pegawai Non PNS/PPPK/Tenaga Kontrak	Provinsi Jambi	1 Kali	7	3.580.759,00	0,00	19.950.000,00	0,00	23.530.759,00
4.05 . 4.05.01 . 11	<b>Program Promosi dan Pengisian Jabatan</b>				744.280.100,00	230.849.300,00	34.829.500,00	8.929.500,00	1.018.888.400,00

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH									
KODE PROGRAM & KEGIATAN	URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	Sumber Dana	TRIWULAN				JUMLAH
					I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 6 + 7 + 8 + 9
4.05 . 4.05.01 . 11 . 01	<b>Pimpinan Tinggi secara terbuka</b> Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	Provinsi Jambi dan Luar Provinsi Jambi	1 Kali	7	610.636.200,00	140.492.000,00	16.992.000,00	2.592.000,00	770.712.200,00
4.05 . 4.05.01 . 11 . 02	Seleksi Pejabat Administrasi	Provinsi Jambi dan Luar Provinsi Jambi	951 Orang	7	133.643.900,00	90.357.300,00	17.837.500,00	6.337.500,00	248.176.200,00
4.05 . 4.05.01 . 12	<b>Program Profesionalisasi PNS</b>				315.769.925,00	546.892.625,00	501.808.765,00	19.913.325,00	1.384.384.640,00
4.05 . 4.05.01 . 12 . 01	Peningkatan Kemampuan ASN Melalui Pemberian Beasiswa Tugas Belajar dan Cost Sharing	Provinsi Jambi	12 Orang	7	35.906.400,00	441.442.000,00	225.254.100,00	2.592.000,00	705.194.500,00
4.05 . 4.05.01 . 12 . 02	Peningkatan Kemampuan ASN Melalui Pengembangan Kompetensi, Diklat, Bimtek, Seminar, Kursus, Sosialisasi dan Workshop	Provinsi Jambi	100 %	7	111.600.000,00	0,00	71.600.000,00	0,00	183.200.000,00
4.05 . 4.05.01 . 12 . 03	Penyelenggaraan Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah	Provinsi Jambi	1000 Orang ASN	7	94.477.800,00	0,00	93.515.300,00	0,00	187.993.100,00
4.05 . 4.05.01 . 12 . 04	Pelayanan Administrasi Jabatan Fungsional Tertentu	Provinsi Jambi dan Luar Provinsi Jambi	1 Kali	7	20.709.100,00	39.374.000,00	36.674.000,00	13.242.900,00	110.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 12 . 05	Pemantauan Disiplin PNS dan Non PNS/PPPK	Provinsi Jambi	12 Laporan	7	6.592.200,00	16.592.200,00	9.092.200,00	590.000,00	32.866.600,00
4.05 . 4.05.01 . 12 . 06	Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS	Provinsi Jambi	25 Laporan	7	46.484.425,00	49.484.425,00	45.484.425,00	3.488.425,00	144.941.700,00
4.05 . 4.05.01 . 12 . 07	Pelaksanaan Sumpah/Janji PNS	Provinsi Jambi	1 Kali	7	0,00	0,00	20.188.740,00	0,00	20.188.740,00
4.05 . 4.05.01 . 13	<b>Program Peningkatan Kesejahteraan PNS dan Pemberian Penghargaan PNS</b>				109.078.500,00	21.933.400,00	49.196.500,00	19.691.600,00	199.900.000,00
4.05 . 4.05.01 . 13 . 01	Penyediaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Provinsi Jambi	125 Stel	7	56.250.000,00	0,00	0,00	0,00	56.250.000,00
4.05 . 4.05.01 . 13 . 02	Pemberian Penghargaan dan Kesejahteraan PNS	Provinsi Jambi	1100 Orang	7	52.828.500,00	21.933.400,00	49.196.500,00	19.691.600,00	143.650.000,00
4.05 . 4.05.01 . 14	<b>Program Pelayanan Publik di Bidang Kepegawaian</b>				218.157.500,00	115.378.300,00	103.650.700,00	66.504.800,00	503.691.300,00
4.05 . 4.05.01 . 14 . 01	Pelayanan Administrasi Pendidikan Lanjutan Aparatur Sipil Negara	Provinsi Jambi	300 Buah	1	17.421.900,00	16.848.100,00	17.453.900,00	16.909.500,00	68.633.400,00
4.05 . 4.05.01 . 14 . 02	Pelayanan Pengangkatan CPNS, Kenaikan Pangkat PNS dan Pensiun PNS	Provinsi Jambi	2800 sk	7	42.984.400,00	45.829.100,00	46.811.400,00	33.651.300,00	169.276.200,00
4.05 . 4.05.01 . 14 . 03	Pelayanan Mutasi dan Kenaikan Gaji Berkala	Provinsi Jambi dan Luar Provinsi Jambi	620 SK	7	36.310.600,00	38.768.100,00	24.518.400,00	2.877.000,00	102.474.100,00
4.05 . 4.05.01 . 14 . 04	Pengelolaan, Pelayanan dan Fasilitas Penerbitan Kartu Pegawai (Karpeg), Kartu	Provinsi Jambi dan	500 Kartu	7	9.345.000,00	11.986.000,00	12.920.000,00	11.120.000,00	45.371.000,00

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH									
KODE PROGRAM & KEGIATAN	URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	Sumber Dana	TRIWULAN				JUMLAH
					I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 6 + 7 + 8 + 9
4.05 . 4.05.01 . 14 . 05	Pegawai Elektronik (KPE), Kartu Isteri (Karis) / Kartu Suami (Karsu)	Luar Provinsi Jambi	100 ASN	7	112.095.600,00	1.947.000,00	1.947.000,00	1.947.000,00	117.936.600,00
4.05 . 4.05.01 . 15	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Kepegawaian	Provinsi Jambi			73.909.000,00	105.703.000,00	59.019.900,00	44.100.000,00	282.731.900,00
4.05 . 4.05.01 . 15 . 01	Program Penyusunan Kebijakan, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi/Rapat Kerja/Forum kepala BKD se-Provinsi/FGD di Bidang Kepegawaian	Provinsi Jambi dan Luar Daerah	1 Kali	7	24.786.500,00	39.131.800,00	0,00	0,00	63.918.300,00
4.05 . 4.05.01 . 15 . 02	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan	Provinsi Jambi dan Luar Provinsi	12 Bulan	7	49.122.500,00	66.571.200,00	59.019.900,00	44.100.000,00	218.813.600,00
4.05 . 4.05.01 . 16	Program Peningkatan Kualitas Informasi Kepegawaian				178.470.100,00	97.975.900,00	50.688.100,00	5.812.600,00	332.946.700,00
4.05 . 4.05.01 . 16 . 01	Penyusunan Buku Data Kepegawaian Pemerintah Provinsi Jambi dan SKPD Provinsi Jambi serta Daftar Urutan Kepangkatan PNS	Provinsi Jambi	60 Buku	7	26.500.000,00	22.336.000,00	4.000.000,00	912.900,00	53.748.900,00
4.05 . 4.05.01 . 16 . 02	Pengelolaan, Pemeliharaan Data dan Informasi Kepegawaian	Provinsi Jambi	12000 Data Pegawai	7	59.447.000,00	43.047.000,00	13.497.000,00	3.042.700,00	119.033.700,00
4.05 . 4.05.01 . 16 . 03	Pengelolaan dan Pemeliharaan Tata Naskah Dinas Kepegawaian Elektronik dan Arsip Fisik	Provinsi Jambi dan Luar Provinsi	12 Bulan	7	49.523.100,00	8.591.000,00	31.691.100,00	1.857.000,00	91.662.200,00
4.05 . 4.05.01 . 16 . 04	Pengembangan Aplikasi Pelayanan Kepegawaian	Provinsi Jambi	1 Aplikasi Kepegawaian	7	43.000.000,00	24.001.900,00	1.500.000,00	0,00	68.501.900,00
<b>JUMLAH</b>					2.195.808.273,10	2.013.597.322,46	1.256.597.904,44	614.996.500,00	6.081.000.000,00
Mengesahkan, Kepala Badan Keuangan Daerah							Jambi, 7 January 2019 KEPALA BADAN		
_____ AGUS PIRNGADI, S.Sos NIP. 19691215 199003 1 005							_____ H. HUSAIRI, S.IP, ME NIP. 196412011985031008		